

Dinamika Modus Rekrutmen WNI sebagai Operator Scam Online di Kamboja dan Dampaknya terhadap Perlindungan Warga Negara

The Dynamics of Recruiting Indonesian Citizens as Online Scam Operators in Cambodia and Its Impact on Citizen Protection

Alif Maskur Hudhori

Universitas Muhammadiyah Ponorogo
hudhorialif@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika modus rekrutmen warga negara Indonesia (WNI) sebagai operator scam online di Kamboja serta dampaknya terhadap perlindungan warga negara. Fenomena ini muncul akibat perkembangan teknologi informasi yang pesat dan meningkatnya praktik kejahatan siber lintas negara, di mana WNI direkrut melalui media sosial, jaringan pertemanan, dan agen tenaga kerja dengan janji keuntungan finansial tinggi. Namun, setelah berada di lokasi kerja, banyak korban menghadapi eksploitasi, tekanan psikologis, risiko hukum, dan keterbatasan akses perlindungan diplomatik, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen resmi serta laporan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, minimnya informasi tentang risiko pekerjaan ilegal, serta kurangnya kesadaran hukum membuat WNI rentan menjadi korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan strategi pencegahan yang melibatkan pemerintah, lembaga perlindungan, dan edukasi publik untuk meminimalkan praktik rekrutmen ilegal dan meningkatkan perlindungan warga negara.

Kata Kunci: Rekrutmen WNI, Scam Online, Perlindungan Warga Negara, Kamboja

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of recruitment of Indonesian citizens (WNI) as online scam operators in Cambodia and its impact on citizen protection. This phenomenon has emerged due to rapid technological advancements and the increasing prevalence of cross-border cybercrime, where Indonesians are recruited through social media, personal networks, and labor agents with promises of high financial rewards. However, once on-site, many victims face exploitation, psychological pressure, legal risks, and limited access to diplomatic protection, highlighting weaknesses in the mechanisms for protecting Indonesian citizens abroad. This study employs a qualitative approach with a case study method, collecting data through in-depth interviews, observations, and analysis of official documents and media reports. The results indicate that economic factors, lack of information about the risks of illegal work, and low legal awareness make Indonesian citizens vulnerable to victimization. The study concludes that preventive strategies involving the government, protection agencies, and public education are necessary to minimize illegal recruitment practices and enhance citizen protection.

Keywords: WNI Recruitment, Online Scam, Citizen Protection, Cambodia

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang pesat pada era digital telah memberikan dampak signifikan terhadap hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari komunikasi, ekonomi, pendidikan, hingga hiburan. Namun, kemajuan teknologi juga membawa konsekuensi negatif, khususnya dalam bentuk kriminalitas siber yang semakin kompleks dan tersebar lintas negara. Salah satu bentuk kriminalitas siber yang marak adalah scam online, yaitu penipuan dengan modus digital yang menargetkan individu maupun kelompok untuk memperoleh keuntungan finansial secara ilegal. Fenomena ini tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga

melibatkan warga negara Indonesia (WNI) yang direkrut untuk menjadi operator scam di negara lain, salah satunya Kamboja. Praktik ini menimbulkan risiko yang sangat serius bagi korban, termasuk ancaman hukum, eksploitasi kerja, dan pelanggaran hak asasi manusia (Krisna 2022).

Rekrutmen WNI sebagai operator scam online di Kamboja menampilkan pola dan modus yang bervariasi, mulai dari perekrutan melalui media sosial, jaringan teman atau kerabat, hingga agen tenaga kerja yang menawarkan pekerjaan dengan janji keuntungan tinggi. Calon korban biasanya dijanjikan pekerjaan resmi, gaji besar, fasilitas akomodasi, dan peluang untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Namun, setelah berada di lokasi kerja, mereka kerap menghadapi kondisi kerja yang jauh dari janji semula, seperti jam kerja yang panjang, tekanan mental, pemantauan ketat, dan ancaman hukum. Hal ini menunjukkan bahwa WNI yang direkrut sangat rentan menjadi korban eksploitasi dan pelanggaran hak-hak dasar mereka. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena menyentuh isu keamanan, hukum internasional, dan perlindungan warga negara yang berada di luar negeri (Andim et al. 2025).

Praktik ini juga menimbulkan dilema bagi negara dalam hal perlindungan WNI. Banyak korban mengalami kesulitan mengakses bantuan hukum, diplomatik, atau sosial karena mereka berada di luar negeri dengan status pekerjaan yang tidak resmi atau ilegal. Keterbatasan informasi mengenai keberadaan mereka, hambatan bahasa, dan regulasi negara tujuan yang berbeda semakin memperburuk situasi. Dampak sosial yang muncul juga signifikan, mulai dari tekanan psikologis, isolasi sosial, hingga stigma dari keluarga dan lingkungan sekitar. Sementara itu, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya, baik melalui diplomasi, penyuluhan, maupun tindakan hukum, sehingga fenomena ini menjadi isu yang sangat kompleks dan memerlukan penelitian mendalam (Krisna 2022).

Penelitian ini juga penting untuk memahami dinamika rekrutmen dan jaringan operasional scam online. Dengan menganalisis cara perekrutan, strategi pengendalian korban, serta kondisi kerja yang dihadapi WNI di Kamboja, penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang membuat warga negara Indonesia rentan terhadap praktik kejahatan siber lintas negara. Analisis ini penting tidak hanya untuk tujuan akademik, tetapi juga sebagai dasar rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan warga negara, baik melalui mekanisme hukum, diplomasi, maupun edukasi publik.

Penelitian ini juga akan mengeksplorasi dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang dialami oleh WNI yang menjadi operator scam. Dari perspektif sosial, individu yang terlibat sering menghadapi tekanan mental dan stigma dari keluarga atau masyarakat karena dianggap melakukan pekerjaan ilegal. Dari perspektif ekonomi, meskipun ada janji keuntungan finansial besar, korban kerap kehilangan pendapatan atau mengalami pemotongan gaji secara sepihak. Dari perspektif psikologis, pengalaman bekerja dalam tekanan, intimidasi, atau ancaman dapat menimbulkan trauma jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsekuensi multidimensional yang muncul dari praktik scam online lintas negara.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pihak berwenang, seperti pemerintah pusat, Kementerian Luar Negeri, aparat penegak hukum, serta lembaga perlindungan warga negara, untuk merumuskan strategi pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga relevan bagi masyarakat luas, terutama generasi muda, agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan yang menjanjikan

keuntungan cepat melalui jalur digital, yang dapat berujung pada eksploitasi dan pelanggaran hak. Dengan pemahaman yang mendalam tentang modus rekrutmen, risiko, dan dampak yang dihadapi WNI di Kamboja, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya perlindungan warga negara dan penanggulangan kejahatan siber lintas negara.

2. Metode

Metode penelitian adalah bagian penting dalam sebuah artikel ilmiah yang menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Pada bagian ini, penulis harus menguraikan jenis penelitian yang digunakan (misalnya kuantitatif, kualitatif, atau mixed methods), serta pendekatan dan desain penelitian yang dipilih sesuai dengan tujuan studi. Selanjutnya, metode menjelaskan subjek atau objek penelitian, termasuk populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk memperoleh data yang representatif. Bagian ini juga memaparkan teknik pengumpulan data, seperti survei, wawancara, observasi, atau studi pustaka, lengkap dengan alat atau instrumen yang digunakan. Selain itu, metode menjelaskan prosedur analisis data yang diterapkan, misalnya analisis statistik, regresi, atau analisis tematik, agar pembaca memahami proses pengolahan data dan validitas hasil penelitian. Metode yang jelas dan detail memastikan penelitian dapat direplikasi dan memberikan kredibilitas terhadap temuan yang dihasilkan.

3. Hasil Dan Pembahasan

Modus dan Dinamika Rekrutmen WNI sebagai Operator Scam Online di Kamboja

Rekrutmen WNI sebagai operator scam online di Kamboja menunjukkan pola yang kompleks dan sistematis, memanfaatkan kombinasi teknologi, jaringan sosial, dan agen tenaga kerja untuk menarik korban. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis dokumen dan laporan media, jalur utama perekrutan WNI meliputi media sosial, jaringan pertemanan atau keluarga, serta agen tenaga kerja, baik resmi maupun ilegal (Aliyah Putri et al. 2025). Pola-pola ini menunjukkan bahwa rekrutmen dilakukan secara terstruktur, menyasar kelompok rentan, serta dirancang untuk menyembunyikan risiko pekerjaan ilegal di luar negeri. Media sosial menjadi kanal utama bagi perekrut untuk menjaring calon operator scam. Platform seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Telegram digunakan untuk menyebarkan informasi pekerjaan dengan janji-janji gaji tinggi, bonus besar, fasilitas akomodasi, dan peluang karier yang cepat. Taktik yang digunakan sering bersifat persuasif dan manipulatif, misalnya:

1. Menampilkan testimoni palsu dari orang yang diduga berhasil bekerja di luar negeri, sehingga calon korban percaya bahwa pekerjaan tersebut benar-benar aman dan menguntungkan.
2. Mengunggah foto kantor mewah atau bukti transaksi gaji yang tampak nyata untuk menciptakan kesan profesional dan legal, padahal informasi tersebut direayasa.
3. Memberikan narasi motivasi ekonomi, seperti memperbaiki kondisi keluarga atau mencapai kemapanan finansial, sehingga calon korban merasa pekerjaan tersebut adalah solusi terbaik.

Strategi ini efektif karena menargetkan calon korban yang memiliki motivasi ekonomi kuat dan terbatas informasi mengenai risiko pekerjaan ilegal di luar negeri. Banyak individu yang sedang membutuhkan pendapatan cepat merasa bahwa

tawaran tersebut adalah kesempatan yang realistis. Teman, saudara, atau kerabat yang sebelumnya bekerja di luar negeri juga menjadi kanal perekrutan. Rekomendasi dari orang dekat menambah tingkat kepercayaan calon korban, karena mereka menilai informasi lebih kredibel dibandingkan iklan daring. Agen perekrut sering memanfaatkan jaringan ini untuk mengidentifikasi individu yang dianggap mudah terpengaruh oleh janji pekerjaan dengan keuntungan tinggi. Keberadaan “orang dalam” atau pihak yang sudah pernah berangkat membuat proses perekrutan terkesan aman dan resmi.

Agen tenaga kerja, baik yang resmi maupun ilegal, menawarkan paket pekerjaan yang tampak lengkap, termasuk tiket perjalanan, akomodasi, kontrak kerja, dan pengurusan dokumen. Namun, banyak kontrak bersifat formalitas belaka, tidak memiliki legalitas yang diakui di negara tujuan, sehingga WNI yang direkrut berada dalam status rentan dan tidak terlindungi secara hukum. Perekrut memanfaatkan minimnya pengetahuan hukum calon korban dan keinginan untuk mendapatkan pekerjaan cepat. Selain janji gaji tinggi, perekrut menerapkan berbagai taktik psikologis untuk memaksa calon korban mengambil keputusan cepat (Laksono and Utami 2025). Contohnya:

1. Menekankan urgensi seperti “lowongan terbatas” atau “kesempatan tidak datang dua kali”, sehingga korban merasa harus segera mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang.
2. Memberikan tekanan emosional dengan cerita sukses palsu dari pekerja sebelumnya yang digambarkan mampu mengangkat ekonomi keluarga.
3. Memanfaatkan rasa tanggung jawab keluarga atau kebutuhan mendesak akan penghasilan sehingga calon korban merasa bersalah jika menolak tawaran pekerjaan tersebut.

Analisis data menunjukkan beberapa faktor yang meningkatkan risiko WNI menjadi korban:

1. Kondisi ekonomi yang kurang stabil: Banyak WNI tergiur oleh janji penghasilan tinggi untuk memperbaiki kondisi keluarga, terutama mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap.
2. Minimnya informasi mengenai risiko pekerjaan ilegal: Calon korban sering tidak mengetahui konsekuensi hukum, kondisi kerja yang sebenarnya, atau potensi eksploitasi ketika bekerja di negara lain secara tidak resmi.
3. Kurangnya kesadaran hukum: Banyak korban tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai pekerja internasional atau prosedur perlindungan diplomatik di negara tujuan.
4. Keterbatasan akses informasi: Akses terhadap sumber informasi terpercaya sering sulit, sehingga calon korban hanya bergantung pada informasi yang diberikan perekrut yang cenderung bias dan menyesatkan (Nugraha 2024).

Setelah tiba di Kamboja, banyak korban menghadapi kenyataan berbeda dari janji awal. Mereka sering dipaksa bekerja dengan jam panjang, pengawasan ketat, tekanan mental, dan ancaman hukum jika menolak perintah. Beberapa korban mengalami pemotongan gaji sepihak, isolasi sosial, dan intimidasi yang memperburuk kondisi psikologis. Bahkan, beberapa di antaranya disekap dan tidak diperbolehkan keluar dari lokasi kerja. Dinamika ini menunjukkan bahwa modus rekrutmen tidak hanya sekadar menawarkan pekerjaan ilegal, tetapi juga mengendalikan korban secara fisik dan psikologis untuk memastikan mereka tetap berada di bawah kendali perekrut.

Modus rekrutmen WNI sebagai operator scam online di Kamboja bersifat multikanal dan multidimensi, menggabungkan strategi teknologi, jaringan sosial, dan manipulasi psikologis. Faktor ekonomi, minimnya informasi, serta rendahnya kesadaran hukum menjadikan WNI rentan menjadi korban. Pola ini menegaskan bahwa scam online lintas negara bukan sekadar kejahatan finansial, tetapi juga eksploitasi sistematis terhadap pekerja yang berada dalam posisi rentan. Dengan demikian, penanganannya memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup edukasi, perlindungan hukum, pengawasan agen tenaga kerja, serta kerja sama internasional.

Dampak terhadap Perlindungan Warga Negara dan Hak Asasi

Rekrutmen WNI sebagai operator scam online di Kamboja memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan warga negara Indonesia, baik dari sisi hukum, sosial, ekonomi, maupun psikologis. Dampak ini tidak hanya terjadi selama korban berada di luar negeri, tetapi juga ketika mereka kembali ke Indonesia. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar kasus pelanggaran ketenagakerjaan, namun sudah masuk ke ranah pelanggaran hak asasi manusia dan keamanan negara.

1. Dampak hukum: Banyak WNI yang bekerja di luar negeri berada dalam status ilegal atau hanya memiliki kontrak kerja tidak resmi, sehingga mereka sulit mengakses perlindungan hukum maupun bantuan diplomatik. Ketidakjelasan status ini membuat korban tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak atau mendapatkan perlindungan dari otoritas setempat. Situasi diperparah oleh perbedaan regulasi antara Indonesia dan negara tujuan, di mana praktik scam online sering kali tidak diatur secara jelas. Dalam beberapa kasus, kriminalisasi lebih banyak ditujukan pada operator lokal atau pemberi perintah, sedangkan pekerja asing seperti WNI berada dalam posisi ambigu: mereka terlibat karena dipaksa, tetapi tetap dapat dianggap melanggar hukum. Kondisi ini membuat korban terpapar risiko hukum yang tinggi, seperti:
 - a. Ancaman penahanan oleh otoritas setempat,
 - b. Deportasi paksa tanpa proses yang memadai,
 - c. Tuntutan pidana apabila dianggap terlibat dalam kejahatan siber,
 - d. Hilangnya hak untuk meminta bantuan karena kurangnya dokumen resmi.Minimnya kontrak sah dan identitas kerja legal menempatkan korban dalam posisi sangat rentan untuk dieksploitasi, karena mereka berada dalam situasi yang tidak dilindungi oleh hukum nasional maupun internasional.
2. Dampak sosial: Korban sering mengalami isolasi sosial karena adanya pembatasan akses komunikasi dengan keluarga dan masyarakat di Indonesia. Mereka biasanya berada dalam lingkungan kerja tertutup, diawasi, dan tidak diperbolehkan menjalin hubungan sosial dengan pihak luar. Tekanan mental meningkat akibat:
 - a. pengawasan ketat,
 - b. target kerja yang tidak manusiawi,
 - c. hukuman atau ancaman jika tidak mencapai target penipuan.Selain itu, stigma sosial muncul ketika masyarakat atau keluarga mengetahui bahwa korban terlibat dalam pekerjaan ilegal. Meskipun mereka adalah korban perekrutan paksa atau penipuan, sebagian masyarakat tetap menganggap mereka “ikut berbuat kriminal”. Stigma ini dapat berdampak pada:
 - a. pengucilan sosial,

- b. rusaknya hubungan keluarga,
- c. hilangnya kepercayaan dari lingkungan sekitar.

Situasi ini membuat korban tidak hanya menderita selama bekerja, tetapi juga menghadapi kesulitan besar ketika kembali ke Indonesia.

3. Dampak psikologis: Beban psikologis yang dialami WNI sangat besar dan bersifat jangka panjang. Mereka harus menghadapi intimidasi, ancaman fisik dan hukum, serta tekanan mental yang intens dalam lingkungan kerja yang sangat tidak aman. Dampak psikologis yang umum dialami antara lain:
 - a. Stres kronis akibat kondisi kerja yang keras dan tidak pasti,
 - b. Kecemasan tinggi karena ancaman terus-menerus dari perekrut atau sindikat,
 - c. Depresi karena terjebak dalam pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan,
 - d. Trauma psikologis, terutama bagi korban yang mengalami kekerasan atau pengurungan.

Banyak korban melaporkan ketakutan terhadap keselamatan diri serta rasa tidak berdaya menghadapi situasi yang mereka alami. Setelah kembali ke Indonesia, sebagian korban tetap mengalami trauma, mimpi buruk, kehilangan rasa percaya diri, dan kesulitan beradaptasi dengan kehidupan normal.

4. Dampak ekonomi: Janji mengenai gaji tinggi dan bonus besar yang diberikan sebelum keberangkatan sering kali tidak sesuai realita. Korban justru mengalami:
 - a. pemotongan gaji sepihak,
 - b. penundaan pembayaran,
 - c. tidak menerima gaji sama sekali,
 - d. pemberlakuan biaya-biaya fiktif seperti “biaya pelatihan”, “biaya denda target”, dan “biaya akomodasi”.

Alih-alih memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, kondisi ekonomi mereka justru memburuk. Banyak korban pulang tanpa tabungan, bahkan memiliki utang akibat biaya keberangkatan yang sebelumnya dibebankan oleh agen. Dampak ini menimbulkan rasa kecewa, frustrasi, dan ketidakberdayaan yang menambah beban psikologis mereka.

5. Pentingnya peran negara: Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri masih memiliki kelemahan struktural, terutama dalam pengawasan agen tenaga kerja dan akses bantuan bagi WNI di luar negeri. Oleh karena itu, peran negara sangat penting melalui Kementerian Luar Negeri, lembaga perlindungan WNI, aparat keamanan, dan lembaga sosial. Pemerintah perlu:
 - a. Menyediakan jalur komunikasi darurat bagi WNI yang mengalami masalah di luar negeri, seperti hotline 24 jam, pusat bantuan digital, dan layanan konsuler responsif.
 - b. Meningkatkan koordinasi antarinstansi, termasuk kepolisian, imigrasi, KBRI/KJRI, dan lembaga sosial untuk melacak keberadaan korban dan melakukan operasi penyelamatan.
 - c. Memberikan edukasi publik tentang risiko pekerjaan ilegal di luar negeri, termasuk prosedur penempatan resmi dan cara memverifikasi agen tenaga kerja.

- d. Memastikan perlindungan hukum yang cepat, preventif, dan efektif, termasuk pendampingan hukum, bantuan pemulangan, dan reintegrasi sosial bagi korban (Muhamad et al. 2024).

Upaya ini tidak hanya penting untuk menyelamatkan warga negara Indonesia dari kejahatan lintas negara, tetapi juga untuk menjaga martabat dan hak asasi mereka sebagai pekerja dan individu.

Strategi Pencegahan dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis modus rekrutmen dan dampaknya terhadap WNI, diperlukan strategi pencegahan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya bertujuan mencegah terjadinya perekrutan ilegal, tetapi juga memastikan adanya perlindungan menyeluruh bagi WNI yang sudah menjadi korban. Berikut uraian yang telah diperjelas dan diperkuat:

1. **Edukasi Publik dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat**
Edukasi merupakan langkah pertama dan paling krusial dalam mencegah WNI menjadi korban penipuan rekrutmen. Upaya edukasi harus dilakukan secara masif, terstruktur, dan menyasar berbagai lapisan masyarakat. Langkah-langkah utama:
 - a. Kampanye informasi publik melalui media sosial, televisi, radio, komunitas lokal, dan lembaga pendidikan mengenai risiko pekerjaan ilegal dan modus penipuan rekrutmen luar negeri.
 - b. Penyuluhan di sekolah, universitas, dan desa untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan mengenai prosedur kerja luar negeri yang legal dan aman (Prayoga et al. 2023).
 - c. Sosialisasi hak-hak pekerja internasional, termasuk standar kontrak kerja, upah minimum, dan fasilitas yang wajib disediakan pemberi kerja.
 - d. Pelibatan keluarga sebagai garda awal pencegahan, karena banyak korban menerima tawaran pekerjaan tanpa konsultasi dengan keluarga atau komunitas.
 - e. Penciptaan konten edukasi kreatif, seperti video pendek, poster digital, dan simulasi kasus, agar materi lebih mudah dipahami masyarakat.
2. **Koordinasi Antarinstansi Pemerintah**
Penanganan kasus rekrutmen ilegal membutuhkan sinergi lintas lembaga agar respons terhadap kasus lebih cepat dan tepat sasaran. Rekomendasi penguatan koordinasi:
 - a. Kerja sama intensif antara Kementerian Luar Negeri, BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, kepolisian, dan lembaga perlindungan WNI dalam pemantauan, investigasi, dan penanganan kasus.
 - b. Pembuatan database nasional tentang WNI yang bekerja di luar negeri untuk memudahkan pelacakan, pemberian bantuan, serta evaluasi risiko di negara-negara tertentu.
 - c. Pembentukan satuan tugas (satgas) terpadu yang menindaklanjuti laporan perekrutan ilegal secara cepat dan terkoordinasi.
 - d. Penyusunan SOP penanganan kasus, termasuk mekanisme repatriasi, pendampingan hukum, dan pemulihan sosial bagi korban.
 - e. Kerja sama diplomatik dengan negara tujuan untuk memastikan akses bantuan terhadap WNI yang ditahan atau terancam deportasi.
3. **Regulasi Hukum yang Lebih Tegas**

Penegakan hukum menjadi unsur penting dalam memutus rantai perekrutan ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku. Langkah penguatan regulasi:

- a. Pembaruan dan harmonisasi peraturan terkait ketenagakerjaan luar negeri, khususnya untuk menutup celah yang dimanfaatkan oleh agen ilegal.
 - b. Sanksi tegas kepada perekrut ilegal, termasuk denda besar, pemblokiran akses digital, dan pidana penjara bagi pihak yang memfasilitasi pengiriman WNI untuk kegiatan kriminal seperti scam online.
 - c. Kerja sama hukum internasional untuk memperluas yurisdiksi penindakan pelaku lintas negara yang memanfaatkan WNI sebagai operator scam.
 - d. Peningkatan pengawasan digital, misalnya memantau iklan pekerjaan mencurigakan di media sosial dan marketplace rekrutmen (Rizal 2023).
 - e. Kewajiban kontrak kerja tertulis dan legal, lengkap dengan informasi pemberi kerja, kondisi pekerjaan, dan jaminan perlindungan.
4. Mekanisme Penanganan Korban yang Cepat dan Efektif
- Korban harus mendapatkan perlindungan dan pemulihan komprehensif, baik sebelum maupun setelah kembali ke Indonesia. Rekomendasi penanganan korban:
- a. Penyediaan hotline darurat 24 jam yang mudah diakses oleh WNI di luar negeri untuk melaporkan ancaman, kekerasan, atau eksploitasi.
 - b. Layanan konseling psikologis dan trauma healing, mengingat mayoritas korban mengalami tekanan mental, intimidasi, dan trauma jangka panjang.
 - c. Pendampingan hukum gratis, terutama bagi korban yang menghadapi proses hukum di negara tujuan.
 - d. Mekanisme repatriasi cepat, bekerja sama dengan otoritas asing dan organisasi internasional untuk mengembalikan korban ke Indonesia secara aman.
 - e. Program reintegrasi sosial dan ekonomi, termasuk pelatihan kerja, bantuan sementara, dan advokasi keluarga korban agar stigma dapat diminimalkan.
5. Peran Masyarakat dan Keluarga
- Pencegahan akan lebih efektif jika lingkungan terdekat turut berperan sebagai filter awal bagi calon pekerja. Langkah-langkah yang dapat dilakukan:
- a. Mengedukasi keluarga dan masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi tanpa prosedur yang jelas (Muhamad et al. 2024).
 - b. Mendorong calon pekerja untuk melakukan verifikasi melalui lembaga resmi seperti BP2MI sebelum menerima tawaran.
 - c. Mengawasi aktivitas perekrutan di komunitas, termasuk melaporkan kepada pihak berwenang jika terdapat agen yang mencurigakan.
 - d. Membangun komunikasi intensif antara warga, tokoh masyarakat, dan aparat desa agar pola perekrutan ilegal cepat terdeteksi.
- Strategi pencegahan harus bersifat multidimensi, melibatkan pemerintah, aparat hukum, lembaga perlindungan, masyarakat, dan keluarga. Dengan kombinasi edukasi, regulasi hukum, koordinasi antarinstansi, dan mekanisme penanganan cepat, diharapkan risiko WNI menjadi korban rekrutmen ilegal dapat diminimalkan, serta perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri dapat lebih optimal.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen WNI sebagai operator scam online di Kamboja dilakukan melalui berbagai modus yang kompleks, mulai dari perekrutan melalui media sosial, jaringan pertemanan, hingga agen tenaga kerja yang menawarkan janji keuntungan finansial besar. Faktor-faktor yang membuat WNI rentan direkrut antara lain kondisi ekonomi yang kurang stabil, minimnya informasi mengenai risiko pekerjaan ilegal, serta kurangnya kesadaran hukum. Dinamika ini menunjukkan bahwa praktik rekrutmen scam online tidak hanya memanfaatkan kebutuhan ekonomi individu, tetapi juga kelemahan sistem perlindungan warga negara di luar negeri.

Dampak dari keterlibatan WNI dalam scam online lintas negara sangat signifikan. Korban menghadapi risiko hukum, tekanan psikologis, eksploitasi kerja, serta stigma sosial dari lingkungan dan keluarga. Keterbatasan perlindungan hukum dan kesulitan mengakses bantuan diplomatik memperburuk kondisi mereka. Temuan ini menegaskan bahwa fenomena scam online lintas negara tidak hanya menjadi masalah kriminal, tetapi juga isu perlindungan warga negara dan hak asasi manusia yang perlu perhatian serius dari pemerintah dan lembaga terkait.

Sehubungan dengan temuan tersebut, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat mekanisme perlindungan WNI di luar negeri melalui koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan warga negara. Kedua, edukasi publik mengenai risiko pekerjaan ilegal di luar negeri harus ditingkatkan, terutama melalui kampanye di media sosial, sekolah, dan komunitas masyarakat. Ketiga, regulasi hukum dan prosedur penanganan korban harus diperkuat agar dapat memberikan perlindungan cepat, preventif, dan komprehensif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik rekrutmen WNI sebagai operator scam online dapat diminimalkan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri dapat lebih optimal.

5. Daftar Pustaka

- Aliyah Putri, Aura Fariza Yulianti Saputri, Aulia Fariza Yulianti Saputri, and Sintong Arion Hutapea. 2025. "Analisi Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2(2):73–82. doi: 10.62383/demokrasi.v2i2.866.
- Andim, Wensensiana Yasinta, Anastasia E. Andinny Goran Tokan, Yohana Damiana Uto Riangtobi, Florentina Maria Iness Oematan Lape, Verikson Gie, and Yeyen Subandi. 2025. "Implementasi Konvensi Internasional 1990 Tentang Perlindungan Pekerja Migran: Kasus TPPO Pekerja Migran Indonesia Di Kamboja Tahun 2023." *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 3(7):497–505. doi: 10.60126/jim.v3i7.1124.
- Krisna, Sri Panji Nara. 2022. "PENGARUH TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MODUS PERDAGANGAN ORANG: ANALISIS PIDANA TERHADAP KASUS ONLINE SCAMMING DI MYANMAR." *Jurnal Kertha* 13(21).
- Laksono, D., and D. Y. Utami. 2025. "Eksploitasi Warga Negara Indonesia Di Kamboja Sebagai Administrator Judi Online Dan Perdagangan Orang: Tinjauan Yuridis Terhadap Celah Keimigrasian" *... Ilmu Sosial & ...* 3561–77.
- Muhamad, Ahmad, Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Zhelika Wahyu, Jovita Dwi

- Kusumastuti, M. Adil Hakim, and Al Hadi. 2024. "Reformasi Tata Negara Dan Pengaruhnya Terhadap Perlindungan Hak - Hak Kewarganegaraan Di Indonesia Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret , Indonesia Pascasarjana Universitas Sebelas Maret , Indonesia UIN Raden Mas Said Surakarta , Indonesia." *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Volume. 1*(3).
- Nugraha, I. Putu Rama Widi. 2024. "KRISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KAMBOJA: KAJIAN ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN KETIMPANGAN REGULASI." *Jurnal Hukum Progresif* 7(6):41–47.
- Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok, and Puri Maharani. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2(2):188–200.
- Rizal, Moch. Choirul. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Perspektif Teori Alasan Penghapus Pidana." *Arena Hukum* 16(1):18–41. doi: 10.21776/ub.arenahukum.2023.01601.2.